

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan, tidak cukup jika hanya memberikan vonis hukuman kepada pelaku saja, oleh karena hal itu masih banyak kasus - kasus korupsi yang terjadi dimana mereka tidak memperdulikan hukuman karena menurutnya ia bisa memanipulasi keadaan dengan uang yang mereka punya, oleh karena itu saat ini titik dimana korupsi sangat bebas terjadi, korupsi telah menjadi masalah di dalam sebuah negara. Dikarenakan dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, maka korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas. Untuk memberantas korupsi, Indonesia telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suatu kondisi yang dapat menyebabkan korupsi antara lain adalah adanya kekuasaan dan kewenangan strategis oleh pejabat publik dan adanya sistem kelembagaan yang lemah. Dalam upaya mengurangi korupsi, cara yang paling efektif untuk mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan hukuman bagi koruptor dan kontrol kelembagaan. Namun kini itu tidak cukup untuk membuat para koruptor merasa jera, karena pada saat ini masih banyak koruptor yang sudah mendapatkan vonis hukuman, namun saat sudah keluar dari penjara ia melakukan korupsi lagi, hal ini bisa jadi dikarenakan adanya sebuah celah peluang untuk melakukan sebuah korupsi lagi.

Contohnya saja kasus korupsi yang baru - baru ini terjadi yaitu kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dimana merugikan banyak masyarakat Indonesia khususnya di bidang pendidikan, karena mantan Kepala SMKN 53 Jakarta, Widodo dan mantan Staff Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Muhamad Faisal, terkait kasus korupsi penyalahgunaan dana biaya operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2018. Mereka ditahan di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat (Medistiara, 2022)

Pasal 30 ayat 1, mengamanatkan bahwa “Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” namun persepsi bahwa bela negara identik dengan perang dan kegiatan wajib militer itu adalah persepsi yang salah, karena bela negara yang dimaksud yaitu untuk memperkuat

rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia ditengah ancaman bagi bangsa saat ini yaitu terorisme, dan korupsi. Pertahanan negara melibatkan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali baik pelajar maupun komponen masyarakat lainnya. Salah satu karakter yang akan dibentuk guna membentuk pelajar mempunyai rasa nasionalisme dan semangat patriotisme dalam lingkup ini adalah melalui mata pelajaran PPKn yaitu membentuk jiwa bela negara yang mempunyai karakter Anti Korupsi.

Pendidikan anti korupsi merupakan cara untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara pendidikan *formal* dan *non formal*. Pendidikan anti korupsi tidak hanya selesai pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja kepada siswa, akan tetapi terus dilakukan dan berkelanjutan pada pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai - nilai anti korupsi menjadi kebiasaan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi memiliki 3 tujuan. Pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek – aspeknya. Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 yang berbunyi:

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu dengan memberikan penekanan dan wadah yang lebih luas bagi terselenggaranya pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajarannya. Dengan penekanan dan wadah yang lebih luas tersebut diharapkan peserta didik sejak dini sudah dapat memahami bahaya korupsi dan selanjutnya terbangun sikap anti korupsi dan perilaku untuk tidak melakukan korupsi

Dalam hal ini maka pendidik harus membangun karakter sikap anti korupsi pada siswa sebagai salah satu usaha untuk menurunkan kasus korupsi, maka dengan terjadinya proses pembelajaran yang intens dengan tujuan membentuk karakter sikap anti korupsi anak didik, dan mampu menanamkan nilai – nilai anti korupsi dalam setiap pembelajarannya,

7 cara menanamkan nilai integritas anti korupsi kepada anak didik:

- Nilai Kejujuran

Membiasakan anak didik selalu meminta izin jika akan meminjam barang punya teman dan mengajarkan untuk percaya diri dengan apapun hasil usahanya, karena saat ini masih banyak anak didik yang melakukan kegiatan mencontek dalam kegiatan pembelajaran maupun ujian.

- Kepedulian

Peduli dengan orang lain tentu mengindikasikan anak didik bahwa ia dapat memahami kesulitan orang lain, disinilah cara menumbuhkan rasa empati anak didik dengan cara mengendalikan emosi dan menunjukkan bagaimana caranya agar ia paham apa yang dimaksud dengan kepedulian terhadap orang lain. Misalnya dengan menghibur orang lain, menolong temanya yang sedang kesusahan.

- Disiplin

Disiplin merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap sebuah aturan, disiplin juga memiliki arti bahwa kebiasaan dan juga tindakan yang konsisten mengenai segala bentuk peraturan yang ada ataupun berlaku. Contohnya bisa dengan mengajarkan anak didik untuk bisa menaati peraturan secara konsisten.

- Mandiri

Mandiri ataupun sebuah sikap yang tidak bergantung dengan orang lain tentu harus ditanamkan kepada anak didik, pada saat anak memiliki masalah dalam proses pembelajaran dikelas, maka sebagai guru kita harus memberi ruang untuk mereka berusaha untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan, sehingga mereka akan terbiasa dengan permasalahan yang akan terjadi di kehidupannya.

- Kesederhanaan

Mengajarkan anak didik untuk terbiasa dengan hal – hal sederhana yang dimana menekankan pentingnya sesuatu hal bukan hanya baru atau bagusnya melainkan fungsinya, sehingga saat besar nanti anak didik terbiasa dan selalu merasa cukup.

- Keberanian

Sikap tidak takut dalam menghadapi sesuatu adalah nilai plus anak didik, maka

dalam hal ini anak didik sudah memiliki sikap percaya diri, memiliki sikap keberanian ini harus perlu di awasi oleh guru juga karena anak harus mengetahui apa yang memang harus ia lakukan dengan baik.

- Keadilan dan Kerja Keras

Gigih dan fokus terhadap sesuatu hal ini harus diajarkan kepada anak didik, sehingga ia dapat memiliki sikap yang adil dan mau bekerja keras untuk hidupnya, untuk menerapkan konsep ini dapat dilakukan dengan menanamkan sikap bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan mengajarkan kepada anak didik untuk bekerja keras agar tidak mudah menyerah dengan apa yang akan dicapainya.

Berdasarkan hal diatas, guru harus mengupayakan pendidikan karakter agar siswa memiliki karakter positif. Maka, untuk mewujudkan nilai – nilai integritas sebagai wujud pendidikan anti korupsi, pembelajaran di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada *moral knowledge* saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai – nilai dalam kehidupan sehari – hari.

Menurut Trianto (2010, hlm. 94) mengatakan “Model pembelajaran yang cocok untuk turut membentuk karakter anti korupsi yaitu dengan menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL), model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan. Permasalahan korupsi ini sangat nyata adanya, maka anak didik seolah – olah berperan didalamnya sehingga akan menumbuhkan juga kesadaran hukum didalam diri mereka yang nantinya mampu membentuk karakter anak didik yang berjiwa anti korupsi. Maka perlu adanya sebuah pembelajaran yang dapat membentuk karakter mereka, salah satunya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Disini peran PPKn dalam membentuk pelajar mempunyai sikap bela negara dengan ditanamkan sikap anti korupsi, yang dimana hal ini perlu adanya pembelajaran *intens* agar dikemudian hari para pendidik ini sebagai penerus bangsa yang nantinya mempunyai karakter yang baik.

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 27 Kota Bandung khususnya kepada siswa

dan siswi kelas XII, untuk mengetahui sejauh mana peran model pembelajaran *Problem Based Learning* dalam penguatan nilai – nilai anti korupsi pada mata pelajaran PPKn terhadap pembentukan karakter anak didik.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Model Pembelajaran *Problem Based Learning* dalam Upaya Penguatan Nilai - Nilai Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran PPKn” (Penelitian Eksperimen di SMA Negeri 27 Kota Bandung.**

A. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran dan tujuannya yang diharapkan dan berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Model *Problem Based Learning* (PBL) Dalam Penguatan Nilai – Nilai pada Mata Pelajaran PPKn?
2. Bagaimana pengaruh mata pelajaran PPKn terhadap pembentukan karakter anti korupsi bagi peserta didik di SMA 27 Kota Bandung?
3. Bagaimana hubungan Model *Pembelajaran Problem Based Learning* terhadap Penguatan nilai – nilai antikorupsi kepada peserta didik saat pembelajaran?

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran *Problem Based Learning* dalam Upaya Penguatan Nilai - Nilai Anti Korupsi Dalam Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 27 Kota Bandung. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Penerapan Model *Problem Based Learning* (PBL) Dalam Penguatan Nilai – Nilai pada Mata Pelajaran PPKn.
2. Mengetahui pengaruh mata pelajaran PPKn terhadap pembentukan karakter anti korupsi bagi peserta didik di SMA 27 Kota Bandung.
3. Mengetahui hubungan Model *Pembelajaran Problem Based Learning* terhadap Penguatan nilai – nilai antikorupsi kepada peserta didik saat pembelajaran .

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara

lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi keilmuan mengenai Model Pembelajaran *Problem Based Learning* dalam Upaya Penguatan Nilai - Nilai Anti Korupsi Dalam Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 27 Kota Bandung.

2. Kebijakan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan kepada sekolah-sekolah bahwa pembentukan karakter anti korupsi adalah sebuah kewajiban setiap sekolah.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah bahwa perlu adanya sebuah pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran yang bergunamen cetak generasi bangsa untuk kedepanya.

3. Praktis

Adapun beberapa manfaat dari segi praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Guru dan Pihak Sekolah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada guru dan pihak sekolah yang menjadi tempat penelitian serta sekolah-sekolah lainnya untuk mulai memberikan edukasi dan pembiasaan kepada peserta didik bahwa pembentukan karakter anti korupsi merupakan hal penting yang akan membentuk karakter anak didik.

b. Peserta Didik

Melalui penelitian ini peserta didik diharapkan nantinya mempunyai karakter dan sikap anti korupsi yang nantinya dapat menjadi generasi yang membawa perubahan sehingga ketika ia terjun di masyarakat maupun saat dimasa yang akan datang mampu menekankan angka korupsi.

c. Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman berpikir dan meningkatkan

pemahaman kepada peneliti dalam mewujudkan Penguatan sikap anti korupsi.

D. Definisi Variabel

Dengan berlandaskan judul diatas, maka peneliti akan menyajikan beberapa definisi dan termologi yang ada didalam penelitian ini agar menghindari salah pengertian dalam istilah-istilah tersebut,yang didefinisikan seperti berikut:

4. Pengaruh

Menurut Surakhmad (2012, hlm 1) mengatakan, “Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan”.

5. Model Pembelajaran

Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman (2012, hlm. 133) mengatakan, “Model pembelajaran adalah rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.”

6. *Project Based Learning* (PBL)

Menurut Barrett dan Moore (2011, hlm. 4) mengatakan, “Model *Project Based Learning* merupakan pembelajaran yang dihasilkan dari suatu proses pemecahan masalah yang disajikan di awal proses pembelajaran. Siswa belajar dari masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, mengorganisasi, merencana, serta memutuskan apa yang dipelajari dalam kelompok kecil.”

7. Upaya

Menurut Baskoro (2005, hlm. 902) mengatakan, “Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar), upaya yang biasa dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan output yang diinginkan, oleh karena itu harus dilaksanakan secara *intens*.”

8. Pendidikan Korupsi

Menurut (LSP-KPK, 2018) mengatakan, “yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi adalah proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa.”

9. Nilai -Nilai Anti Korupsi

Menurut Romi, dkk. 2011 dalam Batennie (2012) mengatakan, “pada dasarnya

korupsi terjadi karena adanya faktor *internal* (niat) dan faktor *eksternal* (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, seperti kebiasaan dan kebutuhan, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Dalam upaya mengurangi korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai - nilai anti korupsi pada semua individu.”

10. Mata Pelajaran PPKn

Menurut Samsuri (2001, hlm. 154) mengatakan, “Pendidikan Kewarganegaraan tersebut dalam diartikan sebagai penyiapan bagi generasi muda (peserta didik) atau penerus bangsa untuk dapat menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, serta juga nilai – nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif didalam bermasyarakat.”

Menurut Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada ayat (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan kewarganegaraan;
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan Pengabdian sesuai dengan profesi.

Menurut Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) diketahui bahwa seluruh warga negara harus melaksanakan bela negara, yang dimana mampu membantu membentuk karakter anti korupsi dalam anak didik khususnya dalam pembentukan sikap anti korupsi, dalam tahanan ini peran Mata Pelajaran PPKn sebagai sarana untuk pembentukan karakter anak didik yang dimana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam mata pelajaran tersebut yang nantinya diharapkan bahwa setelahnya anak didik memiliki karakter yang mampu sebagai penerus bangsa yang berjiwa kritis, jujur dan adil.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar skripsi lebih sederhana, maka disusunlah skripsi secara sistematis,

sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam tahapan ini menguraikan mengenai bagaimana isi dari latar belakang masalah lalu apa saja yang menjadi topik permasalahan, serta adanya tujuan dan manfaat yang didapatkan dari penelitian ini.

2. BAB II KAJIAN TEORI

Tahap ini tentang penekanan landasan teoritis yang dimulai pada temuan – temuan analisis gagasan tentang permasalahan pada penelitian ini melalui kerangka penelitian dan prinsip, strategi, kerangka berfikir dalam kaitanya dengan masalah penelitian.

3. BAB III MODEL PENELITIAN

Tahapan penting dalam penelitian berupa prosedur akademis, yang dimulai dari pendekatan penelitian, model yang digunakan, teknik pengumpulan data serta menentukan subjek dan objek kemudian melakukan uji analisis data yang digunakan oleh peneliti.

4. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Tahap ini mengemukakan temuan analisis tentang inti dan isi dari hasil penelitian dengan penjabaran yang sesuai dengan pendekatan penelitian, model serta teknik pengumpulan data kemudian mengetahui hasil dari analisis data yang telah diperoleh yang akan menjadi bahan uji analisis dalam penelitian ini.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan tentang penutupan dari penelitian berisikan simpulan yang menjadi garis terang dari sebuah permasalahan yang akan diteliti dan saran yang menjadi sebuah pembangun untuk peneliti selanjutnya dalam memperbaiki penelitian ini dengan topik yang serupa.

